

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Mexsasal Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung,
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nur Basuki Winanm, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yuswalina dan Kun Budiarto, 2016, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Setara Press, Malang
- Yusnani, Iwan, Ade, dan Siti, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok

JURNAL

Efi Yulistyowati, Endah Puji Astuti, dan Tri Mulyani, Penerapan Konsep Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Study Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 18 No. 2 Tahun 2016

May Lim Charity, Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesian State System), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Vol 13 No. 1, Tahun 2016

Rahayu Prasetyaningsih, Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Ilmu Hukum*, Vol 4 No. 2 Tahun 2017

Rahmat Gaib, Posisi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD 1945, *Lex et Societatis*, Vol 3 No. 10, Tahun 2015

Riris Katharina, Posisi Wakil Menteri Dan Implikasinya Terhadap Birokrasi Di Indonesia, *Politica*, Vol 2 No. 2 Tahun 2011

Zaki Ulya, Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Position Of Deputy Minister Of State In The System Operation Of Government Under The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol 13 No. 2, Tahun 2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XVII/2019

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

INTERNET

<https://www.idntimes.com/business/economy/auriga-agustina-3/siapa-saja-wakil-menteri-yang-rangkap-komisaris-ini-daftarnya>

<https://www.wikiapbn.org/jabatan/>

